

SMK PESANTREN: SEBUAH PENELITIAN AKAR IDEOLOGI PENDIDIKAN

Siti A'isyah

ibuafasda@gmail.com

Institut Agama Islam Al-Qolam Gondanglegi Malang

Abstrak: Artikel ini membahas tentang SMK Pesantren dengan fokus pada pencarian ideologi pendidikannya. Artikel ini menggunakan teori ideologi pendidikan dari Giroux dan Aronowitz (konservatif, liberal dan kritis), serta teori kesadaran Freire (magis, naif, dan kritis). Berdasarkan latar belakang bahwa SMK dan pesantren, secara epistemologis, berangkat dari cita-cita ideologis yang berbeda dan bahkan kontradiktif. Dilihat dari teori ideologis yang diprakarsai oleh Giorux dan Aronowitz, pendidikan pesantren dapat dimasukkan ke dalam kategori konservatif dan kritis, sementara pendidikan kejuruan lebih tepat untuk disertakan dalam kategori liberal. Seperti yang terlihat dari teori kesadaran Freire, pendidikan pesantren dapat secara unik menggabungkan kesadaran magis dan kritis, sementara pendidikan kejuruan berangkat dari kesadaran naif. Mungkinkah institusi pendidikan berangkat dari ideologi kritis dan juga kaum liberal secara bersamaan? Bisakah kesadaran naif digabungkan dengan kesadaran kritis tentang entitas yang sama? Artikel ini mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan tujuan utama SMK Pesantren tidak saling tidak sepakat antara dua entitas yang membangunnya, yaitu SMK dan pesantren.

Kata kunci: ideologi, pesantren, kejuruan, pendidikan.

Abstract: This article discusses about SMK Pesantren with a focus on the search of it's educational ideology. As the perspective, this article uses the theory of educational ideology from Giroux and Aronowitz (conservative, liberal and critical), as well as Freire's consciousness theory (magical, naive, and critical). Based on the background that SMK and *pesantren*, epistemologically, depart from different, and even contradictory, ideological ideals. Being seen from the ideological theory initiated by Giorux and Aronowitz, *pesantren* education can be included into conservative and critical categories, while vocational education is more appropriate to be included in the liberal category. As seen from the Freire consciousness theory, pesantren education can uniquely combine magical and critical awareness, while vocational education departs from naive consciousness. Could educational institutions depart from the critical ideology as well as the liberals simultaneously? Could a naive consciousness be coupled with a critical awareness of the same entity? This article tries to answer these questions with the main purpose of SMK Pesantren is not mutually disagree between the two entities that build it, namely SMK and *pesantren*.

Keywords: ideology, *pesantren*, vocational, education.

Pendahuluan

Akhir-akhir ini, pendidikan kejuruan atau vokasional semakin marak di Indonesia. Tak kurang dari pendidikan menengah hingga pendidikan tinggi dicanangkan untuk ditingkatkan jumlah pendidikan bidang

vokasional. Pada pendidikan menengah, hal ini tampak pada maraknya sekolah-sekolah kejuruan atau SMK. Pada tahun 2012, menteri pendidikan saat itu, yakni Muhammad Nuh, menargetkan penambahan jumlah SMK hingga melampaui jumlah SMA dengan perbandingan 55:45 pada tahun 2015, sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk lebih mengedepankan pendidikan vokasi. Bahkan pada tahun 2020, jumlah SMK ditargetkan mencapai 60 persen dari sekolah menengah yang ada.¹ Lebih jauh, Kementerian Agama juga mencanangkan pembangunan MAK (Madrasah Aliyah Kejuruan) yang mulai dirintis awal tahun 2016 di provinsi Riau.² Sedangkan pada pendidikan tinggi, kebijakan ini terwujud pada dorongan untuk menambah jumlah perguruan tinggi yang bersifat diploma atau vokasional atau politeknik. Demikian juga penggalakan kurikulum berbasis KKNI yang secara keseluruhan orientasinya adalah penyiapan lulusan yang dapat langsung diterima di dunia kerja.³ Latar belakang dari pilihan-pilihan di atas adalah keresahan pemegang kebijakan pendidikan pusat bahwa lulusan pendidikan tinggi di Indonesia tidak sesuai dengan harapan dunia kerja dan dunia industri. Orientasi Perguruan Tinggi dianggap lebih bersifat akademik murni.

Dalam konteks Pendidikan Menengah Kejuruan atau SMK, pemerintah mengalokasikan dana yang cukup besar karena memang dijadikan prioritas dalam pengembangan pendidikan. Tidak hanya kementerian pendidikan yang terlibat dalam pendidikan kejuruan ini, tapi juga didukung oleh lembaga kementerian lain. Menteri Koordinator Kemaritiman tahun 2014-2016, Rizal Ramli, dan Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri, misalnya, dalam rentang waktu empat tahun mulai tahun 2016 akan menggelontorkan 44 triliun rupiah untuk mengadakan program pendidikan *vocational training* dan *vocational education* dengan bekerja sama dengan sejumlah negara sahabat. Kebijakan tersebut, demikian Rizal Ramli, dibuat karena anggaran untuk pendidikan umum masih belumimbang dengan anggaran untuk pendidikan kejuruan. Anggaran pendidikan umum mencapai 414 triliun rupiah pertahun. Padahal sistem pendidikan di Indonesia seharusnya lebih menekankan pada sektor skill

¹ Administrator, "Jumlah SMK Terus Ditambah," *Kompasiana*, diakses pada 29 April 2016, edukasi.kompas.com/read/2012/08/29/20190521/Jumlah.SMK.Terus.Ditambah.

² Administrator, "Kanwil Kemenag Mulai Bangun Madrasah Aliyah Kejuruan," diakses 29 April 2016, m.antaranews.com/berita/538656/kanwil-kemenag-mulai-bangun-madrasah-aliyah-kejuruan.

³ Administrator, "Program Vokasional Harus Dikelola secara Khusus," diakses pada 29 April 2016, edukasi.kompas.com/read/2012/09/11/11373884/Program.Vokasional.Harus.Dikelola.Secara.Khusus.

sebagaimana Jerman dan Swiss, bukan menekankan sektor keilmuan seperti Amerika atau Inggris.⁴

Di samping pendidikan kejuruan umum, pemerintah juga memberikan stimulasi yang cukup fantastis bagi pendirian dan pengembangan SMK berbasis komunitas, termasuk SMK berbasis pesantren. Di tahun 2016, misalnya, bantuan pembangunan dan renovasi gedung SMK berbasis komunitas atau pesantren saja mencapai 171 miliar rupiah. Tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memberikan stimulus untuk pendidikan kejuruan berbasis komunitas ini. Pemerintah daerah Jawa timur, misalnya, pada tahun 2014 memberikan stimulasi pendirian 40 SMK mini di beberapa pesantren yang memiliki SMK berupa hibah masing-masing 250 juta.⁵

Sekilas pembangunan SMK di pesantren ini tampak sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap dunia pesantren sebagai lembaga pendidikan yang berperan besar mendidik generasi muda Islam di Indonesia. Diharapkan, lulusan pesantren tidak hanya memiliki pengetahuan tentang ilmu-ilmu keagamaan, tetapi juga akan memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia kerja dan industri atau memiliki kapasitas untuk melakukan wirausaha. Di samping itu, para lulusan SMK diharapkan menjadi para pekerja yang lebih berakhlak karena menggabungkan pendidikan vokasi dengan pendidikan pesantren.

Cita ideal tersebut menjadi problematik karena, secara epistemologis, pendidikan pesantren dan pendidikan kejuruan berangkat dari dasar ideologi yang berbeda bahkan berseberangan. Tulisan ini akan menyoroti tentang ideologi pendidikan SMK dan pendidikan pesantren.

Ideologi Pendidikan

Sebelum beranjak pada pembahasan tentang ideologi pendidikan SMK maupun pendidikan pesantren, perlu dipahami dulu tentang ideologi pendidikan itu sendiri agar pembahasan menjadi lebih sistematis. Perbincangan tentang ideologi pendidikan merupakan perbincangan yang sangat mendasar karena ideologi pendidikan menjadi pondasi yang menentukan warna dan pola paradigma, proses, serta *output* yang dihasilkan.⁶ Ideologi sendiri dimaknai sebagai seperangkat ide, nilai, dan

⁴ Administrator, "Siapkan Rp 44 Triliun, Pemerintah Perkuat Pendidikan Kejuruan," 19 April 2016, di akses pada 22 Oktober 2016, <https://m.tempo.co/read/news/2016/04/19/090763903/siapkan-rp-44-triliun-pemerintah-perkuat-pendidikan-kejuruan>.

⁵ Yang dimaksud dengan SMK mini adalah pendidikan kejuruan yang dijalani hanya dalam waktu 6 bulan saja, sehingga lebih mirip dengan Balai Latihan Kerja atau BLK. Lihat Administrator, "Jatim Dirikan SMK Mini di Pesantren," diakses pada 22 Oktober 2016, m.jaringnews.com/politik-peristiwa/umum/62327/jatim-dirikan-SMK-mini-di-pesantren.

⁶ William F. O'Neill, *Educational Ideologies Contemporary Expressions of Educational Philosophy* (Iowa: Hunt Publishing Company, 1990).

aturan tentang kebenaran terberi yang diperoleh manusia dari pengalaman yang kemudian membentuk kesadaran dan mempengaruhi tingkah laku.⁷ Menurut Sastrapratedja, ideologi meliputi tiga unsur yakni interpretasi, preskripsi dan program aksi. Interpretasi merupakan tafsir atas realitas, preskripsi adalah seperangkat nilai atau ketentuan moral, sedangkan program aksi meliputi orientasi pada tindakan.⁸ Sedangkan ideologi pendidikan adalah norma atau tata nilai yang menjadi dasar dalam merumuskan hakikat, makna, tujuan, serta cara untuk mencapai tujuan pendidikan.⁹

“Pengetahuan tentang pemikiran, gagasan, pendapat, dan cita rasa manusia dalam suatu masyarakat melalui kajian empirik dan sistematis untuk digunakan sebagai dasar paradigma-filosofis dalam melakukan sebuah usaha sadar dan terencana bagi pengembangan seluruh potensi baik pengetahuan, keterampilan, kemampuan maupun watak melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan dalam rangka menanamkan ilmu dan akhlak dalam diri anak atau peserta didik untuk mencapai kedewasaan.”¹⁰

Dalam wacana ideologi pendidikan terdapat tiga paradigmaa pokok pendidikan menurut Giroux dan Aronowitz: konservatif, liberal dan kritis. Paradigma konservatif berpandangan bahwa pendidikan tidak dapat berpretensi untuk mengubah kondisi sosial. Masyarakat tidak dapat merencanakan perubahan atau mempengaruhi perubahan sosial. Namun di sisi lain, penderitaan yang ditanggung oleh manusia, baik berupa kemiskinan, buta huruf, dan ketertindasan merupakan akibat dari kesalahan manusia sendiri. Menurut paradigmaa ini, kebahagiaan manusia dapat diperoleh dengan cara beradaptasi dengan harmoni serta menghindari konflik dan kontradiksi atau pro *status quo*. Sejalan dengan hal tersebut, pendidikan menurut ideologi ini adalah upaya untuk mengkondisikan peserta didik agar dapat beradaptasi dengan kondisi masyarakat sehingga keutuhan harmoni dapat terus dilestarikan. Adapun paradigmaa liberal beranggapan bahwa pendidikan adalah entitas yang terlepas dari konstelasi ekonomi politik masyarakat. Namun di sisi lain, paradigma ini selalu berusaha menyesuaikan pendidikan dengan dengan kondisi politik ekonomi dengan cara mengupayakan reformasi pendidikan dalam berbagai aspeknya demi menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Reformasi tersebut tampak misalnya dalam pengembangan

⁷ Nanang Martono, *Pendidikan Bukan Tanpa Masalah: Mengungkap Problematika Pendidikan dari Perspektif Sosiologi* (Yogyakarta: Gava Media, 2010), 36.

⁸ HM Nasruddin Anshoriy, *Dekonstruksi Kekuasaan: Konsolidasi Semangat Kebangsaan* (Yogyakarta: LKiS, 2008), 139.

⁹ *Ibid.*, 37.

¹⁰ Ahmad Muthohar AR, *Ideologi Pendidikan Pesantren: Pesantren di Tengah Arus Ideologi-Ideologi Pendidikan, Ikhtiar Memotret dan Mencari Formulasi Baru Sistem Pendidikan Pesantren dalam Berbagai Ideologi Pendidikan Kontemporer* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007), 42.

infrastruktur dan metodologi pembelajaran. Berbeda dengan dua paradigma tersebut, paradigma kritis mengandaikan pendidikan sebagai sebuah proses penyadaran dan perjuangan politik demi perubahan fundamental pada struktur politik ekonomi masyarakat. Tugas pendidikan adalah melaksanakan transformasi sosial dari struktur yang tidak berkeadilan dengan pemihakan kepada rakyat kecil dan tertindas.¹¹

Freire, dengan teori kesadarannya, senada dengan tiga kategori paradigma ala Giroux dan Aronowitz ini. Bagi Freire, pendidikan seharusnya bertujuan membangkitkan kesadaran kritis peserta didik, bukan melembagakan kesadaran magis ataupun kesadaran naif mereka. Kesadaran magis menganggap kondisi sosial masyarakat disebabkan kekuatan di luar manusia yang bersifat supranatural (baca: takdir Tuhan), kesadaran naif menjadikan faktor subjek sebagai akar permasalahan dalam suatu kondisi sosial sehingga perubahan akan dapat dilakukan dengan melakukan ‘pembangunan sumber daya manusia.’ Tugas pendidikan menurut kesadaran ini adalah mengarahkan peserta didik dapat beradaptasi dengan struktur yang dianggap bersifat ‘*given*.’ Proses pendidikan yang demikian disebut sebagai proses dehumanisasi. Kesadaran kritis, menurut Freire, adalah kesadaran bahwa akar persoalan masyarakat terletak pada struktur dan sistem sosial. Tugas pendidikan adalah memberikan pemahaman tentang sistem dan struktur yang tidak adil tersebut sekaligus menciptakan kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat dalam proses penciptaan sistem dan struktur sosial yang lebih berkeadilan.¹²

Baik Freire maupun Giroux dan Aronowitz menganggap bahwa ideologi dan paradigma pendidikan yang ketiga sebagai sebagai model yang ideal karena lebih memanusiakan manusia dan lebih menyentuh pada inti persoalan yang mereka hadapi. Proses pendidikan bagi mereka seharusnya membangunkan fitrah dan kesadaran terdalam manusia, berpihak kepada kepada yang lemah dan tertindas, serta dapat melakukan transformasi sosial ke arah sistem dan struktur yang berkeadilan.

Sejarah dan Ideologi Pendidikan Pesantren

Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang khas (*indigenous*) Indonesia. Bagi sebagian ahli, pondok pesantren merupakan metamorfosis dari lembaga pendidikan ala Hindu Budha (*padepokan*) yang diberi warna Islam. Karena merupakan buah dialog dengan tradisi lokal, hasil metamorfosis ini tidak monolitik melainkan sangat berwarna di setiap wilayah Nusantara. Surau di Sumatera, misalnya, atau dayah di Aceh,

¹¹ Stanley Aronowitz dan Henry Giroux, *Education Under Siege: The Conservative, Liberal, and Radical Debate Over Schooling* (London: Routledge & Kegan Paul, 1987).

¹² Mansour Fakih, “Pendidikan Alternatif: Melihat Kembali Gagasan Paulo Freire,” dalam *Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik* (Yogyakarta: Insist Press dan Pustaka Pelajar, 2002), 108-127.

memiliki tradisi yang, dalam beberapa aspek, berbeda dengan sistem santri langgar di Jawa.¹³

Seiring dengan perkembangan Islam yang pesat di Indonesia, lembaga pesantren ini memiliki peran yang semakin besar, tidak hanya pada ranah pendidikan tapi juga pada wilayah sosial politik. Pondok pesantren, dengan para tokoh penyebar Islam awal di wilayah-wilayah Indonesia, merupakan motor penggerak transformasi sosial dan penggerak perlawanan politik terhadap penguasa yang tiran dari masa kerajaan hingga perjuangan kemerdekaan. Perjuangan Pangeran Diponegoro, revolusi petani di Banten, hingga resolusi jihad november 1945 hanya contoh kecil dari peran besar pesantren dalam proses berbangsa dan bernegara.

Yang paling menarik tentang peran pesantren adalah keberhasilannya menjadikan Islam sebagai mayoritas di Nusantara. Sudah dipahami bersama, keberhasilan ini adalah buah dari strategi pengislaman yang sangat kreatif dan menghargai tradisi lokal. Perjuangan Wali Songo melalui budaya untuk mengenalkan Islam, semisal wayang dan gending menghasilkan, alih-alih tradisi lokal yang diislamkan tapi, Islam yang melokal atau membumi. Karena itulah Islam menjadi sangat mudah diterima oleh masyarakat di Nusantara.

Tradisi Unik Pendidikan Pesantren

Bentuk awal mula pesantren merupakan lembaga transfer pengetahuan keislaman (fikih dan tauhid) dan sekaligus pusat kegiatan amalan zikir dan *sulūk* (tasawuf). Proses transfer ilmu tersebut tidak berlangsung secara klasikal-formal tetapi berbentuk pengajian informal sehingga tidak mengenal jenjang pendidikan ataupun kriteria lulusan. Santri masa tersebut merupakan santri kelana yang *ngangsu* ilmu dari satu pesantren (baca: kiai) ke pesantren yang lain setelah menamatkan kitab kajiannya. Sedangkan kegiatan *sulūk* atau zikir tidak hanya dilakukan santri kelana tapi juga masyarakat sekitar pesantren. Karena itulah terdapat adagium bahwa “menjadi santri berarti menyematkan status santri kepada diri seumur hidup.”

Inilah salah satu bentuk keunikan tradisi pesantren. Pesantren ternyata bukan hanya lembaga transfer ilmu tapi juga tempat untuk menempa karakter, baik pada individu, pola relasi sosial maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada level individu, pesantren membentuk pribadi yang sederhana bahkan asketik, cinta ilmu, dan mandiri. Dalam kaitan dengan kehidupan sosial pesantren menggembleng santri untuk peduli lingkungan sekitar, setia kawan dan rela berkorban. Sementara

¹³ Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*, edisi 2 (Bandung: Mizan, 1995), 17.

dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, tradisi pesantren menyumbangkan nilai-nilai luhur yang tersarikan dalam ideologi Aswaja, yakni sikap *tawāsuṭ* (moderat), *tasāmuḥ* (toleransi), *ukhuwwah* (persaudaraan), *rahmah li al-‘ālamīn* (rahmat bagi semesta alam), *tawāzun* (seimbang), *al-amr bi al-ma‘rūf wa al-nahy ‘an al-munkar* (mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemunkaran).

Gus Dur menyebut pesantren sebagai sebuah subkultur, artinya pesantren menjadi sistem nilai berbeda dan menjadi rujukan dan ukuran moral masyarakat. Dalam konteks ini kiai menjadi pemimpin kultural yang memandu arah perubahan masyarakat. Peran-peran kesejarahan ini pada gilirannya mengalami pasang surut, dan hari ini menghadapi tantangan yang besar dengan adanya globalisasi yang membawa serta budaya-budaya ‘asing’ bagi pesantren dan terutama budaya konsumerisme dan hedonisme yang disuntikkan secara gencar dan masif oleh kekuasaan industrialisme dan kapitalisme.

Ideologi Pendidikan Pesantren

Sejak masa awal, yakni dalam bentuk surau, langgar dan sebagainya, pendidikan pesantren lebih diarahkan pada pembinaan ruhani dan penguatan masyarakat di bidang sosial politik. Sangat dapat dipahami, karena waktu itu merupakan masa pengenalan dan penyebaran Islam di berbagai wilayah di Nusantara. Karena itu, pendidikan yang menonjol saat itu lebih bernuansa sufistik.

Hingga bergulirnya modernisasi, masyarakat pesantren tetap menjadi sebuah sub-kultur yang mendukung dan melestarikan nilai-nilai tradisional. Nilai-nilai kesalihan didasarkan kepada tradisi yang diamalkan Rasulullah, para sahabat dan tabi'in serta tradisi-tradisi yang termaktub dalam kitab kuning. Pesantren sebagai subkultur berkembang sebagai konsekuensi logis dari perubahan ruang dan waktu.¹⁴ Dengan kata lain, ideologi pendidikan pesantren mengacu pada literatur klasik yang tidak hanya menjadi referensi tapi juga menjadi ruh dan ideologi. Dari khazanah klasik yang dipegang teguh di kalangan pesantren tersebut tumbuh sikap-sikap yang identik dengan pesantren, seperti *tawassuṭ* (moderat), *tawāzun* (seimbang), *i‘tidāl* (jalan tengah), dan *tasāmuḥ* (toleran).¹⁵

Di samping itu, peran pesantren dalam transformasi sosial juga tidak terbantahkan. Di samping perjuangan transformatif Rasulullah, pesantren mewarisi ruh perjuangan yang dilakukan oleh Wali Songo dan ulama-ulama sesudahnya di Nusantara. Artinya, pesantren tidak hanya berkuat

¹⁴ Jamali, “Kaum Santri dan Tantangan Kontemporer”, dalam Marzuki Wahid (ed.), *Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), 140-141.

¹⁵ Said Aqil Siradj, *Tasawuf sebagai Kritik Sosial: Mengedepankan Islam sebagai Inspirasi Bukan Aspirasi* (Bandung: Mizan, 2006), 209-210.

dengan fikih dan tasawuf secara teoritis, tetapi juga memperjuangkan transformasi sosial menuju masyarakat yang lebih sejahtera secara spiritual maupun secara material. Di samping itu, pengaruh Wali Songo yang mengambil prinsip akulturasi dalam penyebaran Islam juga tampak pada sikap moderat pesantren. Hal ini menjadi salah satu faktor mempermudah pesantren diterima oleh segala jenis kalangan. Tidak mengherankan jika banyak pesantren justru muncul di wilayah kelam, di daerah-daerah pinggiran yang penuh dengan kejahilan dan kejahatan, seperti di Tebuireng. Pesantren berperan besar merubah masyarakat Tebuireng menjadi masyarakat santri. Hal ini juga terjadi di berbagai wilayah tempat tumbuhnya pesantren.

Perjuangan transformasi sosial komunitas santri juga mewujudkan dalam perjuangan melawan penjajah sebagai bentuk upaya melawan ketidakadilan. Pada masa VOC, komunitas santri melakukan perlawanan hingga banyak para kiainya yang diasingkan hingga ke Tanjung Gading, Afrika Selatan, seperti Syekh Yusuf Makassar dan Tokoh Keraton Sampang Madura. Masa kolonial ditandai dengan perlawanan kaum santri seperti Diponegoro pada Perang Jawa (1825-1830)¹⁶ dan perlawanan kaum petani di Banten (1888) yang dimotori oleh komunitas santri sufi.¹⁷ Peran kaum santri dalam perjuangan melawan penjajah juga sangat besar dalam proses kemerdekaan dalam berbagai format, mulai angkat senjata hingga proses perumusan dasar-dasar negara.

Peran tersebut tidak hilang pada masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Pesantren mengambil peran sebagai penengah sekaligus pembela bagi masyarakat santri yang mayoritas kalangan bawah di hadapan penguasa, melalui para kiai. Di samping itu pesantren juga berperan melakukan pemberdayaan masyarakat baik secara ekonomi dan terutama pendidikan formal. Pesantren membangun pendidikan formal demi mengimbangi tuntutan perkembangan zaman akan sekolah-sekolah “umum.” Pada masa reformasi, ketika radikalisasi agama bermunculan, nilai-nilai pesantren yang moderat dan toleran menjadi alternatif yang menginspirasi hingga ke mancanegara.

Paparan tersebut menunjukkan bahwa pesantren tidak hanya mendidik santri tentang agama (baca: fikih, tauhid dan tasawuf) secara teoritis *an sich*, tetapi juga mengajarkan kepedulian dan upaya transformasi sosial melalui berbagai cara. Fakta tersebut semakin memantapkan warna ideologi pendidikan pesantren, yakni pendidikan yang mengedepankan

¹⁶ Kesantrian Diponegoro dapat dilacak dari darah leluhurnya, genealogi ilmu agamanya, serta jaringan pesantren yang membantunya dalam Perang Jawa. Lihat Peter Carey, *Takdir: Riwayat Pangeran Diponegoro (1785-1855)* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2014).

¹⁷ Lihat Sartono Kartodirdjo, *The Peasants' Revolt of Banten in 1888: Its Conditions, Course, and Sequel* (Amsterdam: S.Gravenhage-Martinius Nijhoff, 1966).

sikap moderat, toleran, mengedepankan sikap zuhud dan sederhana, serta memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan sosial.

Sejarah dan Ideologi Pendidikan SMK

Untuk memahami ideologi pendidikan SMK, maka perlu ditelusuri sejarah pendidikan modern di Indonesia, karena sejak adanya modernisasi pendidikan di Indonesia, pergulatan tentang ideologi yang mendasari proses maupun lembaga pendidikan tidak pernah berakhir hingga hari ini. Pendidikan di satu sisi menjadi wahana tempa bagi karakter generasi muda, sementara di sisi lain juga dituntut untuk memenuhi kebutuhan pragmatis kehidupan masyarakat maupun kepentingan-kepentingan berbagai institusi dengan beragam ideologinya.

Berbeda dengan pendidikan pesantren yang lahir dari rahim tradisi Nusantara, pendidikan modern di Indonesia muncul dari politik balas budi pemerintah kolonial terhadap kemakmuran yang telah dicurahkan oleh bumi dan rakyat Nusantara. Sejarah telah mencatat bahwa kebangkrutan yang dialami kerajaan Belanda yang disebabkan perang dengan Prancis, pemberontakan Belgia, dan korupsi yang menggerogoti maskapai dagang VOC telah menyebabkan negara tersebut hampir ambruk. Salah satu strategi yang diambil untuk menanggulangi kebangkrutan tersebut adalah kolonialisasi Nusantara. Kolonialisasi memberi peluang besar untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari kekayaan alam bumi Nusantara.

Mulai awal abad ke-19 M proses kolonialisasi dilaksanakan melalui penyewaan lahan yang berlanjut dengan sistem tanam paksa (1830-1870 M). Sistem sewa lahan ternyata tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dan kurang mendatangkan keuntungan.¹⁸ Justru perlawanan muncul dari kalangan pribumi Nusantara hingga memunculkan Perang Jawa yang dipimpin oleh Diponegoro (1825-1830 M). Perang Jawa ini membuat Kerajaan Belanda semakin terperosok dalam kerugian. Pasca perang Jawa, sistem tanam paksa diberlakukan. Selama 40 tahun sistem tanam paksa tersebut terbukti dapat menganggis kebangkrutan Kerajaan Belanda bahkan memberikan *surplus* keuntungan yang sangat tinggi. Kerajaan Belanda tidak hanya dapat menutup tumpukan hutang-hutangnya tapi juga dapat membangun berbagai sarana-prasarana baik di Bumi Nusantara maupun di Negeri Kincir Angin sendiri.

Sistem tanam paksa sebenarnya dirancang tidak hanya untuk memberikan kemakmuran bagi pemerintah Kerajaan Belanda tapi juga bagi rakyat Bumi Nusantara. Sistem ekonomi Nusantara, terutama di Jawa, yang berbasis komunal dan sangat feudalistik dianggap sebagai

¹⁸ Noer Fauzi, *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia* (Yogyakarta: Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar, 1999), 28-29.

penghalang bagi kemakmuran rakyat. Karena itulah dalam sistem tanam paksa, keterlibatan rakyat hingga taraf desa dirancang untuk dilibatkan dalam sistem ekonomi berbasis pertanian melalui sistem *cultuur-stelsel*.¹⁹ Sistem yang diundangkan lewat *Staatblad* (Lembaran Negara) tahun 1834 No. 22 ini memuat ketentuan antara lain: (1) akan diadakan persetujuan dengan penduduk mengenai penyediaan tanah yang akan ditanami tanaman ekspor; (2) tanah yang disediakan tidak boleh lebih dari seperlima tanah petani, (3) lahan yang ditanami tanaman ekspor dibebaskan dari pajak, (4) serta pekerjaan untuk menanam tanaman perdagangan tidak boleh melebihi dari pekerjaan dalam menanam padi. Dalam masalah pajak, jika hasil tanaman melebihi pajak tanah yang harus dibayar maka selisihnya harus diberikan kepada petani. Begitu juga Panen tanaman yang gagal bukan akibat dari tindakan petani, maka kerugian yang menanggung adalah pemerintah.²⁰

Namun demikian, pada prakteknya di lapangan, sistem ini ternyata justru kontraproduktif. Rakyat yang diidealkan akan mendapatkan kemakmuran justru terperosok dalam kemiskinan karena tanam paksa mewajibkan penduduk akar rumput mengganti produk cocok tanamnya dari padi dan jagung sebagai makanan pokoknya dengan berbagai produk tanaman ekspor tahunan seperti tebu, nila, tembakau, maupun tumbuhan keras semisal kopi, kina dan teh.²¹ Selain pemerintah Belanda, pihak yang mendapatkan keuntungan dari sistem ini adalah para bupati dan kepala desa yang mau menjadi perpanjangan tangan pemerintah kolonial dalam implementasi sistem *cultuur-stelsel* tersebut.

Keuntungan berlipat ganda di hadapan penderitaan rakyat tersebut menggugah sebagian masyarakat Belanda, terutama kaum intelektual untuk menggugat ketidakadilan pemerintah kerajaan Belanda. Kaum etis ini dipelopori oleh Pieter Brooshoof dan C. Th. van Deventer. Dari gugatan tersebut muncul gagasan politik balas budi yang dikemas dalam politik etis yang meliputi edukasi, irigasi dan emigrasi.²² Dari ketiga program politik etis yang disahkan Ratu Wilhelmina pada tahun 1901 tersebut, dua program terakhir justru disalahgunakan untuk kepentingan

¹⁹ D. H. Burger, *Structural Changes in Javanese Society: The Village Sphere, Translation Series: Modern Indonesia Project Southeast Asia Program* (Ithaca NY: Department of Far Eastern Studies Cornell University, 1957), 2. Hal senada ditulis oleh Oleh Robert van Niel. Lihat Robert van Niel, "Measurement of Change under the Cultivation Sistem in Java, 1837-1851," *Jurnal Indonesia* 14 (Oktober 1972): 89-109.

²⁰ Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan di Indonesia* (Yogyakarta: Aditya Media, 1991), 56.

²¹ Sejak awal sistem ini diusulkan oleh Van den Bosch, telah muncul keraguan dari beberapa pihak di Kerajaan Belanda karena dianggap sebagai bentuk monopoli VOC model baru. Lihat van Niel, *Measurement of Change*, 89-90.

²² M.C. Ricklefs, *A History of Modern Indonesia since C. 1200*, edisi 3 (Hampshire: Palgrave, 2001), 193-194.

pemerintah kolonial sendiri. Pembangunan irigasi hanya untuk perkebunan milik Belanda sementara imigrasi juga dilakukan demi memenuhi kebutuhan kuli di perkebunan-perkebunan Belanda di luar Jawa. Hanya kebijakan edukasi yang memiliki efek yang cukup besar bagi pembentukan dunia pendidikan di Indonesia. Bahkan politik etis dianggap sebagai salah satu faktor pendorong tumbuhnya nasionalisme hingga terbentuknya *nation-state* Indonesia.

Beberapa kritik yang muncul terhadap politik etis bidang edukasi adalah hak pendidikan yang hanya diberikan kepada para priyayi, sedangkan rakyat kebanyakan masih sangat sulit memperoleh pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kolonial ini. Sementara itu, dari sisi ideologi, pendidikan ala Barat melalui implementasi politik etis ini juga dianggap sebagai proses penanaman ‘keberadaban’ ala Barat seiring dengan pengesampingan sistem pendidikan *indigenous* Nusantara.²³ Di samping itu, pendidikan yang diberikan oleh kolonial Belanda berorientasi kepada kepentingan pihak kolonial sendiri. Hal ini tergambar pada varian pengajaran dan pendidikan yang dilaksanakan saat itu yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: pendidikan bertujuan untuk membentuk orang-orang yang terampil pelaksanaan operasional mekanisme Hindia Belanda, kaum terpelajar secara halus dipisahkan dari rakyat melalui pembelajaran bahasa dan gaya hidup Belanda, pelajaran dan sistem sasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan struktur industri, perhatian lebih kepada pendidikan formal, elitisasi pendidikan dan kaum terpelajar, dan sebagainya.²⁴

Sistem edukasi yang digagas melalui politik etis ini juga menandai lahirnya dualism sistem pendidikan di Indonesia, pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diakui legalitasnya oleh negara, sedangkan pendidikan nonformal adalah pendidikan berbasis komunitas yang biasanya tumbuh bersama tradisi setempat. Sistem pendidikan pesantren dapat dikategorikan pada bentuk kedua. Hingga masa reformasi, pemilahan pendidikan formal-informal ini bahkan tercantum dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam UU tersebut bahkan terdapat pemilahan lagi dengan adanya pendidikan nonformal (pasal 26) dan pendidikan informal (pasal 27).²⁵

Politik etis juga melahirkan dualisme ilmu pengetahuan, agama dan umum. Dikotomi agama dan umum tampaknya dipengaruhi oleh sekularisme yang muncul dan berkembang di Eropa setelah berabad-abad

²³ Ibid., 199-201.

²⁴ YB Mangunwijaya, *Paradigma Baru Pendidikan Rakyat, dalam Menggagas Pendidikan Rakyat: Ototentrisitas Pendidikan dalam Wacana Politik Pembangunan* (Bandung: Alqaprint, 2000), 83-87.

²⁵ Suparlan, *Mencerdaskan Kehidupan Bangsa: Dari Konsepsi Sampai dengan Implementasi* (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2004), 167-169.

agama (baca: Kristen) menjadi monopoli pihak gereja dan berkongkalikong dengan para penguasa. Dikotomi agama-umum ini, sebelumnya tidak dikenal pada masa pra-kolonial. Sistem pendidikan Nusantara mengajarkan tatacara kehidupan beragama, bermasyarakat, sekaligus pengetahuan dan praktik kehidupan sosial-politik dan ekonomi, bahkan teknologi. Pada masa penyebaran Islam oleh Wali Songo, para wali sendiri merupakan penasehat politik sekaligus keagamaan bagi para Raja Kerajaan Demak. Begitu pun teknologi pelayaran dan alutsista dibuat sendiri oleh masyarakat yang *notabene* adalah santri dan peserta didik para wali tersebut. Bahwa Sunan Bonang, Sunan Kalijaga dan beberapa wali yang lain merupakan seniman, sastrawan sekaligus budayawan tak dapat dibantah dengan karya-karya mereka. Di wilayah Madura, beberapa abad kemudian, Kiai Kholil Bangkalan terlibat dalam pembuatan perahu layar yang diberi nama Sarimuna dan pernah melakukan pelayaran ke pulau Kalimantan. Hal ini menunjukkan bahwa kalangan masyarakat santri di bawah bimbingan Kiai Kholil, dan bisa jadi Kiai Kholil sendiri, juga menguasai teknik navigasi yang meliputi kemampuan membaca arah mata angin, astronomi serta kemampuan membaca jenis gelombang lautan.²⁶

Karena itu, tidak mengherankan jika dikatakan bahwa sistem pendidikan politik etis justru menjadi titik balik bagi sistem pendidikan di Indonesia. Seorang sejarawan Belanda bahkan menyatakan secara tegas bahwa politik etis merupakan gong diresmikannya penerapan ideologi developmentalisme di bumi Nusantara.²⁷

Masa orde lama, yang merupakan masa awal pasca kemerdekaan, menjadi masa upaya konsolidasi nasional yang secara politis ditandai dengan berbagai kontroversi tentang ideologi negara. Karena itu, pendidikan pada masa itu lebih bertujuan untuk membangun masyarakat sipil yang kuat. Pendidikan pada masa itu diarahkan pada penumbuhan watak, semangat patriotisme dan kesadaran bela negara atau nasionalisme. Pada tahun 1965, kebijakan politik mulai memasuki dunia pendidikan dengan diwajibkannya ideologi manipol-usdek melalui keputusan presiden nomor 145 tahun 1965. Dalam Keputusan presiden tersebut disebutkan bahwa:

“Tujuan pendidikan nasional baik yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah maupun oleh pihak swasta, dari pendidikan pra sekolah sampai pendidikan tinggi supaya melahirkan warga negara sosialis Indonesia yang susila, yang bertanggungjawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis

²⁶ Tim Penulis JNM, “Syaikhona Kholil: Teknologi Pelayaran dan Penyebaran Islam Nusantara,” dalam *Gerakan Kultural Islam Nusantara* (Yogyakarta: Jaringan Nahdliyin Mataram, 2015), 192-195.

²⁷ Anne Booth, “Living Standards and the Distribution of Income in Colonial Indonesia: A Review of the Evidence,” *Journal of Southeast Asian Studies* 19, no. 2, (September 1988): 310.

Indonesia adil dan makmur spiritual maupun material dan yang berjiwa Pancasila.”²⁸

Orde baru dengan yang kental dengan ideologi pembangunanisme pun menggeser ideologi pendidikan pada penanaman Ideologi Pancasila ala penguasa. Motto yang diusung adalah “membangun manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia.” Pada praktiknya, pendidikan berorientasi membentuk peserta didik untuk menjadi manusia pekerja yang nantinya diharapkan berperan sebagai alat bagi penguasa dalam melaksanakan kebijakan negara. Dalam beberapa kurikulum yang pernah diciptakan pada masa ini, peserta didik tampak diarahkan menjadi robot-robot yang menguasai berbagai teori dan terpisah dari realitas kehidupan masyarakat yang riil. Peserta didik dibentuk menjadi orang-orang yang berorientasi pragmatis demi terwujudnya ideologi penguasa.

Gagasan *link and match* yang dicetuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wardiman Jayonegoro pada tahun 1990-an semakin menegaskan ideologi pendidikan rezim orde baru yakni pengaminan kepada ideologi developmentalisme yang berakar pada ideologi kapitalisme dan liberalisme.²⁹ Gagasan *link and match* berangkat dari anggapan bahwa dunia pendidikan harus terkait dengan dunia kerja. Dengan kata lain orientasi pendidikan adalah untuk mempersiapkan tenaga kerja yang siap pakai terutama di dunia industri. Dengan demikian, dunia kerja tidak perlu lagi membuat pelatihan kerja bagi para lulusan pendidikan. Di satu sisi, paradigma ini bernuansa positif dalam arti memberi kemudahan bagi peserta didik pasca lulus dari dunia pendidikan. Para lulusan tidak perlu lagi dipusingkan dengan kehidupan pasca sekolah karena sekolah telah menyiapkannya menjadi tenaga kerja terampil. Namun di sisi lain, paradigma ini menjadi sebuah distorsi besar-besaran terhadap dunia pendidikan karena pendidikan hanya dimaknai sebagai wahana mempersiapkan “generasi tukang” yang “siap pakai” bagi dunia industri.

²⁸ Administrator, “Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila,” diakses pada Senin, 24 Oktober 2016, <http://bphn.go.id/data/documents/65pnp019.doc>.

²⁹ Ideologi developmentalisme pada dasarnya merupakan format *soft copy* dari ideologi kapitalisme dan liberalisme yang diperuntukkan bagi negara-negara yang baru merdeka dari penjajahan seperti Indonesia. Pada masa perang dingin, saat ideologi kapitalisme dengan USA sebagai komandan berhadapan-hadapan dengan ideologi komunisme yang dipimpin oleh Uni Soviet, pihak USA meluncurkan kebijakan pembangunanisme bagi Negara-negara yang dianggap *underdevelopment* (terbelakang). Kebijakan ini diluncurkan pada 20 Januari 1949 ketika Harry S. Truman mengumumkan kebijakan pemerintahan luar negerinya untuk mengukuhkan posisi adikuasa di dunia. Marzuki Wahid, “Pesantren di Lautan Pembangunanisme: Mencari Kinerja Pemberdayaan,” dalam *Pesantren Masa Depan*, 152-156. Baca juga Mansour Fakhri, *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi* (Yogyakarta: Insist dan Pustaka Pelajar, 2001).

Ideologi pembangunanisme di penghujung abad ke-20 bertransformasi pada ideologi globalisme atau globalisasi yang disebut juga dengan neo-liberalisme.³⁰ Globalisasi sendiri merupakan proses pengintegrasian ekonomi nasional kepada sistem ekonomi internasional.³¹ Ideologi ini beranggapan bahwa sistem ekonomi dunia harus diserahkan kepada mekanisme pasar. Negara tidak perlu lagi memberikan proteksi bagi lembaga-lembaga yang sebelumnya bertanggung jawab untuk mengupayakan kesejahteraan rakyat (privatisasi). Privatisasi menjadi salah satu bahan yang harus ada dalam resep yang diberikan oleh lembaga-lembaga pelaksana neoliberalisme, seperti World Bank, IMF (International Monetary Fund) dan WTO (World Trade Organization), demi mencapai kesejahteraan masyarakat. Pada kenyataannya, program-program yang diresepkan tersebut hanya menambah kekayaan perusahaan-perusahaan multinasional (TNCs atau *Trans National Corporations*) dan semakin menyengsarakan rakyat kecil. Penggerusan tradisi dan potensi lokal, pengambilalihan sumber daya alam, peminggiran petani dan pertanian, penghentian subsidi bagi masyarakat miskin dan pelemahan posisi buruh dan pekerja adalah sebagian bentuk yang ditanggung rakyat akibat globalisasi.³²

Dalam konteks tenaga kerja, pengaruh globalisasi sangat signifikan. Globalisasi mengharuskan negara-negara yang terikat perjanjian internasional untuk merubah regulasi tenaga kerja terutama tentang sistem *outsourcing* atau sistem kerja kontrak. Sistem ini menjadikan posisi tawar buruh dan tenaga kerja lemah di hadapan pemilik modal. Sebagai negara berkembang dan terikat dengan perjanjian internasional, Indonesia juga menerapkan sistem ini dengan disahkannya UU No. 13 tahun 2003. Globalisasi juga membuka peluang yang besar bagi tenaga kerja untuk bekerja di luar negaranya. Walaupun tampaknya memberikan kemudahan bagi tenaga kerja, namun di sisi lain memberatkan bagi tenaga kerja tidak terampil di negara-negara miskin atau berkembang karena tidak memiliki

³⁰ Liberalisme sendiri pada dasarnya adalah paham yang memperjuangkan kebebasan individu dari kungkungan komunitas. Pada perjalanan selanjutnya liberalism bergeser menjadi ideologi politik ekonomi yang memperjuangkan *laissez faire* (persaingan bebas). Adapun neo-liberalisme merupakan kebangkitan kembali paham liberalisme yang dalam bentuk aliran ekonomi yang ingin menghapus peran negara dan intervensi pemerintah dalam ekonomi dan menyerahkannya pada mekanisme pasar. Liberalisme dalam bentuk developmentalisme runtuh pada penghujung abad 20 ketika terjadi krisis moneter di berbagai Negara berkembang terutama di kawasan Asia Tenggara. Keruntuhan liberalisme ini segera ditanggapi oleh bangkitnya neo-liberalisme melalui lembaga-lembaga pelaksanaannya seperti World Bank, IMF dan WTO. Mansour Fakhri, *Bebas dari Neoliberalisme* (Yogyakarta: Insist Press, 2010), 53-55.

³¹ *Ibid.*, 208-211.

³² *Ibid.*, 219-222.

daya saing.³³ Globalisasi sendiri memungkinkan bagi *multinational enterprise* untuk menanam modal (PMA/Penanaman Modal Asing) di negara-negara yang memiliki tenaga kerja murah.³⁴

Berangkat dari kondisi tenaga kerja Indonesia di hadapan sistem ini, pemerintah memiliki komitmen yang sangat besar untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi tenaga kerja yang dapat bersaing dengan tenaga kerja asing.³⁵ Komitmen ini terejawantah dalam bentuk pendirian sekolah dan perguruan tinggi vokasional. Dana yang besar juga digelontorkan untuk pengembangan lembaga-lembaga pendidikan tersebut. Fakta ini menunjukkan bahwa eksistensi pendidikan SMK tidak dapat dilepaskan dari ideologi globalisme dan ideologi pasar.

SMK Pesantren: Cita Mengawinkan Dua Ideologi yang Berhadapan?

Paparan tentang sejarah pendidikan pesantren dan pendidikan SMK di muka memperlihatkan perbedaan latar belakang eksistensi keduanya. Bahkan, dalam beberapa hal, keduanya berada pada wilayah yang berhadap-hadapan terutama secara ideologis. Jika pesantren terlahir dari akar tradisi dan keberagaman, SMK muncul dari sela-sela sejarah panjang kolonialisme. Akar historis ini mewarnai secara dominan ideologi yang diusung oleh masing-masing entitas pendidikan tersebut.

Secara ideologis, pendidikan pesantren bisa dimasukkan kategori konservatif dalam arti melestarikan dan mentransmisikan nilai-nilai yang diyakini. Namun, meskipun pesantren selalu diidentikkan sebagai golongan konservatif, karena dianggap berorientasi pada karya ulama abad pertengahan, sebenarnya selalu terjadi pembaruan dan penyesuaian dengan perubahan. Hanya saja, perubahan tersebut yang terjadi secara kompleks dan perlahan.³⁶ Dengan demikian, cukup sulit untuk mengidentikkan pendidikan pesantren dengan ideologi pendidikan liberal ala Giroux dan Aronowitz, karena pendidikan pesantren merupakan entitas yang inern dengan masyarakat. Jika pun akhir-akhir ini bermunculan pesantren yang cenderung eksklusif, hal itu merupakan respons terhadap perkembangan dan dinamika masyarakat modern, atau terlahir dari

³³ Robert Caurbaugh, "The International Economy and Globalization," dalam *International Economics*, edisi 11 (Kanada: Thomson South-Western, 2008), 21.

³⁴ Wagiran, "Pengembangan Pendidikan Kejuruan Berbasis Potensi Daerah dan Sumberdaya Alam dalam Mendukung Continuing Vocational Education," *Prosiding Seminar Internasional Peran LPTK dalam Pengembangan Pendidikan Vokasi di Indonesia: Konvensi Nasional V Aptekindo Forum Komunikasi FT/FFTK/FPTK-JPTK Universitas se-Indonesia* (dilaksanakan di Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha Denpasar 29 April-2 Mei 2010), 600.

³⁵ Administrator, "SMK Bukan Pendidikan Kelas Dua," diakses pada 23 Januari 2017, <http://presidenri.go.id/pendidikan/SMK-bukan-pendidikan-kelas-dua.html>.

³⁶ Clifford Geertz, "Modernization in A Moslem Society: The Indonesian Case," dalam *Quest*, vol. 39 (Bombay: t.p., 1963), 16.

komunitas muslim yang eksklusif seiring dengan gencarnya globalisasi yang memunculkan *genre* Islam trans-nasional.

Sementara itu, melalui kacamata ideologi pendidikan ala Giroux dan Aronowitz, pesantren juga dapat dikategorikan pada pendidikan kritis. Dalam sejarahnya, pesantren telah mendidik peserta didiknya untuk sensitif terhadap kondisi kaum yang dilemahkan sistem. Pesantren juga terbukti kerap kali memperjuangkan keadilan dan melakukan perlawanan terhadap kesewenang-wenangan.

Ideologi pendidikan pesantren semakin menarik jika diteropong dengan teori kesadaran ala Paulo Freire. Sebagaimana telah disebutkan di muka, Freire menganggap bahwa kondisi sosial masyarakat dipengaruhi oleh kesadaran yang dimiliki masyarakat bersangkutan. Freire membagi kesadaran pada tiga jenis, yakni kesadaran magis, kesadaran naif, dan kesadaran kritis. Kesadaran magis meyakini jalan hidup karena faktor supranatural atau kuasa tangan Tuhan, kesadaran naif menjadikan faktor subyek sebagai penentu arah kehidupan, sementara kesadaran kritis menganggap bahwa persoalan struktur dan sistem merupakan faktor utama yang mewarnai warna kondisi sosial. Freire juga meyakini bahwa pendidikan yang ideal adalah ketika mengedepankan kesadaran kritis serta mengesampingkan kesadaran magis dan kesadaran naif. Baginya, kesadaran magis atau kesadaran naif harus diupayakan bergeser menjadi kesadaran kritis karena hanya kesadaran kritis yang dapat melakukan transformasi dari ketidakadilan dan ketertindasan.

Akan tetapi, pada konteks pendidikan pesantren, kesadaran magis ternyata dapat dipadukan secara harmonis dengan kesadaran kritis. Pesantren yang merupakan lembaga pendidikan dan sekaligus lembaga sosial keagamaan meyakini sepenuhnya kuasa tangan Tuhan atau takdir Yang Maha Kuasa dalam perjalanan kehidupan. Namun, *track record* pesantren menunjukkan bahwa kesadaran magis tersebut tidak mematikan kesadaran kritis dalam memandang realitas. Uniknya, kesadaran magis tersebut justru menjadi asah bagi sikap kritis dan perjuangan transformasi sosial.

Kesimpulannya pesantren sulit untuk dikerangkeng teori-teori pendidikan tersebut. Pendidikan pesantren bisa dipahami dari tradisinya sendiri yakni ajaran Islam yang kemudian ditransmisikan oleh ulama. Pendidikan pesantren memperhatikan dua aras: (1) hati dan (2) akal. *Output* paripurna dari pendidikan pesantren adalah ulama *ākhirah* atau ilmunan yang tidak hanya berorientasi dunia saja, sebagai *ideal type* kaum terdidik ala pesantren, yang bercirikan: (1) menjauhi cinta dunia (2) Konsisten antara nilai yang diyakini dengan tindakan (3) siap membela nilai yang diyakini dan berjarak dengan yang bertentangan (4) ilmu baginya diarahkan pada medan perjuangan hidup bukan untuk citra diri (5) Tidak mengumbar statemen dan perdebatan yang tidak perlu (6)

Sederhana dan *qanā'ah* (7) berwatak independen di hadapan kekuasaan (8) menjadi pelopor gerakan perubahan jika terjadi ketidakadilan.³⁷

Dengan demikian, pendidikan pesantren adalah fungsi dari pemaksimalan tugas manusia yakni menjadi *khalīfah fī al-ard* (wakil Allah di bumi) yang mempunyai fungsi membuat kebaikan di bumi (*ishlāh fī al-ard*). Fungsi ini mengandaikan santri harus mempelajari ilmu-ilmu kebaikan dunia di segala bidang. Konsekuensi logisnya santri harus mengetahui gerak sejarah masyarakat agar memahami apakah yang diperbuat produktif terhadap penyebaran kemaslahatan atau justru sebaliknya menjadi penyokong ketidakadilan dan kerusakan.

Fungsi *khalīfah fī al-ard* kedua adalah mengabdikan pada Tuhan (*'ibād*). Artinya, pendidikan pesantren mengantarkan peserta didik untuk menjadi hamba Tuhan yang baik; mengerti kewajiban sebagai hamba di hadapan Tuhannya. Pada fungsi ini, pendidikan pesantren juga menjadikan hati sebagai objek yang diperhatikan. Pendidikan dalam konteks ini bertujuan untuk menumbuhkan aspek moral yang adiluhung pada peserta didik agar dalam menjalankan fungsi *ishlāh fī al-ard* disandarkan pada motivasi ketuhanan.

Sementara itu, jika diteropong dengan teori tentang ideologi pendidikan ala Giroux dan Aronowitz, pendidikan SMK sejalan dengan ideologi pendidikan konservatif sekaligus liberal. Sejalan dengan ideologi konservatif dalam arti pendidikan hanya mengamini apa kata kekuasaan, dalam hal ini kekuasaan ideologi kapitalisme. Pendidikan hanya bertugas menciptakan tenaga kerja murah bagi industri. Pendidikan SMK di sisi lain juga seiring dengan ideologi liberal dalam arti dilakukan reformasi kelembagaan secara besar-besaran dengan melengkapi fasilitas pendidikan yang dibutuhkan dan didukung dengan dana yang sangat besar, mengembangkan metodologi pembelajaran, serta menyesuaikan diri dengan kondisi politik ekonomi. Tujuan akhir yang diharapkan dari reformasi kelembagaan ini adalah terciptanya tenaga kerja yang ahli dan siap pakai dalam bursa tenaga kerja industri.

Melalui kacamata teori kesadaran Paulo Freire, ideologi pendidikan SMK dapat diasumsikan berangkat dari kesadaran naif. Dengan anggapan bahwa akar persoalan terletak pada sumber daya manusia dengan kapasitas dan keterampilan yang kurang memadai, tindakan yang perlu dilakukan adalah membekali mereka dengan pengetahuan dan skill yang dibutuhkan pasar tenaga kerja. Sayangnya, dalam kurikulum SMK sendiri memang tidak ditemukan upaya pengayaan peserta didik dengan nalar kritis.³⁸ SMK

³⁷ Muḥammad al-Nawawī, *Qāmi' al-Tughyān* (Surabaya: Ṣaḥābat al-'Ilm, t.th.), 18-19.

³⁸ Pola pendidikan yang nir-pengayaan nalar kritis di Indonesia sebenarnya bukan melulu terjadi pada sekolah kejuruan, tapi juga terjadi pada sekolah bahkan pendidikan tinggi nonkejuruan. Lembaga pendidikan pada umumnya dipahami sebagai tempat transfer ilmu pengetahuan.

memang diteguhkan sebagai penyedia tenaga kerja terampil *an sich* demi memenangkan persaingan pasar *skilled worker*.

Dengan perbedaan ideologi yang dimiliki oleh pendidikan pesantren dan SMK, SMK Pesantren seolah mencoba mengawinkan air dengan minyak. Mungkinkah lembaga pendidikan berangkat dari ideologi kritis sekaligus liberal secara bersamaan? Mungkinkah kesadaran naif bersanding dengan kesadaran kritis pada entitas yang sama? Sementara itu, mengesampingkan faktor ideologi, fakta menunjukkan bahwa kondisi masyarakat santri juga membutuhkan pemberdayaan secara ekonomi. Menyikapi hal tersebut, apakah SMK Pesantren menjadi pilihan dengan tanpa mempedulikan sisi ideologi pendidikannya yang berhadap-hadapan? Perlukah menggagas dan merumuskan ideologi pendidikan hibrid demi 'mengayomi' SMK Pesantren?

Bagaimanapun, SMK, terutama SMK Pesantren, selayaknya tidak berhenti pada dua warna ideologi saja, yakni konservatif dan liberal, tetapi harus juga merengkuh, bahkan mengedepankan ideologi pendidikan kritis. SMK Pesantren perlu mengedepankan proses penyadaran peserta didik akan pentingnya perubahan fundamental dalam bidang politik, sosial dan ekonomi, serta kesadaran pemihakan kepada *mustad'afin* (yang lemah/tertindas). Diharapkan, lulusan SMK Pesantren tidak hanya memikirkan diri sendiri tapi juga memperjuangkan lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, bukan ideologi pasar yang mewarnai pesantren, tetapi sebaliknya ideologi pendidikan pesantren yang memberi nilai lebih bagi pendidikan SMK. Dengan bahasa lain, bukan pendidikan pesantren diwarnai oleh ideologi pendidikan SMK, namun sebaliknya ideologi pendidikan pesantren mesti memberi pola pada pendidikan SMK. SMK Pesantren bukan dimaknai sebagai pemenuhan kebutuhan tenaga kerja, menyiapkan tukang yang siap pakai, mengamini ideologi pasar. SMK Pesantren justru dimaknai sebagai kepedulian pesantren terhadap tenaga kerja, memberi nilai lebih terhadap tenaga kerja; tenaga kerja yang tetap memiliki idealism dan memegang teguh nilai-nilai pesantren yang nota bene merupakan nilai-nilai Islam Nusantara.

Pendidikan SMK selama ini tidak bisa dipisahkan dari kondisi politik-ekonomi global yang menganggangi bangsa kita, termasuk SMK Pesantren. Kebutuhan negara akan investasi dan penyediaan tenaga kerja pendukung adalah maksud utamanya. Jika dibiarkan, maka *output* pendidikan SMK Pesantren masuk dalam gelombang besar globalisasi yang berfungsi mensukseskan kepentingan kapital yang diuntungkan dengan tersedianya tenaga kerja. Alih-alih perubahan, pendidikan SMK Pesantren justru akan melanggengkan struktur ekonomi dan sosial dari globalisasi.

Gagasan *link and match* pada konteks ini tetap relevan dalam makna siap menghadapi tantangan kehidupan, bukan hanya sinkron dengan dunia

kerja.³⁹ Dengan pemaknaan baru ini, *link and match* tidak berkonotasi pemenuhan kebutuhan pribadi atau pemenuhan kebutuhan tenaga kerja para pemodal besar, tetapi memiliki arti lebih luas. Ia menjadi representasi kepedulian kepada kondisi masyarakat luas, upaya mewujudkan kesejahteraan bersama, bahkan perjuangan melawan ketidakadilan.

Lalu harus bagaimana? Apakah SMK Pesantren harus dihindari? Menghindar dari globalisasi adalah hal yang naif. Ia harus diterima sebagai sebuah kenyataan. Tetapi ikut arus manjadi tempat penyedia tenaga kerja bagi pemodal juga bukan langkah yang tepat. Masih ada banyak pilihan untuk mengembangkan SMK agar menjadikan lulusannya tetap berkarakter pesantren, sebagaimana berikut. (1) Karakter pendidikan pesantren tetap menjadi hal utama. Artinya, bukan dengan memasukkan muatan pesantren saja akan tetapi nilai-nilai pesantren menjadi visi SMK. (2) Dengan demikian, skill diarahkan pada inovasi. SMK bukan lagi diarahkan sebagai konsumen teknologi tetapi inovasi teknologi tepat guna yang bisa mengembangkan masyarakat di sekitarnya. Harapannya, SMK Pesantren adalah manifestasi dari fungsi *ishlāh fī al-ard*. Artinya, skill yang diajarkan diarahkan untuk mengembangkan masyarakat, bukan sekedar penyiapan tenaga kerja. Dengan dua kebijakan ini, akan muncul kebijakan SMK yang tidak akan terlepas dari nilai pesantren.

Hal ini mensyaratkan tradisi pesantren tempat berdirinya SMK sudah sangat kokoh, sehingga SMK Pesantren dimaknai sebagai pengembangan tradisi pesantren tersebut. Dengan akar tradisi yang kokoh maka inovasi pendidikan apapun akan tidak tercerabut dari *khittah*-nya. Jika tidak, maka akan muncul fenomena di beberapa pesantren; tradisi pesantren menipis, kadang tidak lebih dari kos-kosan, dikalahkan aura SMK yang kadang jauh visi pesantren. Ujung-ujungnya, makna pesantren yang melekat di SMK Pesantren hanya berarti SMK yang lahir dan bertempat di pesantren, tetapi secara substansial tidak mempunyai nilai beda dengan SMK yang berada di luar pesantren.

Catatan Akhir

Pesantren sulit untuk dikerangkeng teori-teori pendidikan apapun. Pasalnya, pendidikan pesantren adalah fungsi dari pemaksimalan tugas manusia yakni menjadi *khalīfah fī al-ard* (wakil Allah di bumi) yang mempunyai fungsi membuat kebaikan di bumi (*ishlāh fī al-ard*). Jika diteropong dengan teori tentang ideologi pendidikan ala Giroux dan Aronowitz, pendidikan SMK sejalan dengan ideologi pendidikan konservatif sekaligus liberal. Sejalan dengan ideologi konservatif dalam

³⁹ Mochamad Syafei, "Salah Pemahaman Terhadap *Link and Match*," diakses pada 25 Oktober 2016, http://www.kompasiana.com/mochamadsyafei/salah-pemahaman-terhadap-link-and-match_5520423da33311c043b65ca4.

arti pendidikan hanya mengamini apa kata kekuasaan, dalam hal ini kekuasaan ideologi kapitalisme. Pendidikan hanya bertugas menciptakan tenaga kerja murah bagi industri. Pendidikan SMK di sisi lain juga seiring dengan ideologi liberal dalam arti dilakukan reformasi kelembagaan secara besar-besaran dengan melengkapi fasilitas pendidikan yang dibutuhkan dan didukung dengan dana yang sangat besar, mengembangkan metodologi pembelajaran, serta menyesuaikan diri dengan kondisi politik ekonomi. Tujuan akhir yang diharapkan dari reformasi kelembagaan ini adalah terciptanya tenaga kerja yang ahli dan siap pakai dalam bursa tenaga kerja industri.

Melalui kacamata teori kesadaran Paulo Freire, ideologi pendidikan SMK dapat diasumsikan berangkat dari kesadaran naif. Dengan anggapan bahwa akar persoalan terletak pada sumber daya manusia dengan kapasitas dan keterampilan yang kurang memadai, tindakan yang perlu dilakukan adalah membekali mereka dengan pengetahuan dan skill yang dibutuhkan pasar tenaga kerja. Sayangnya, dalam kurikulum SMK sendiri memang tidak ditemukan upaya pengayaan peserta didik dengan nalar kritis. SMK memang diteguhkan sebagai penyedia tenaga kerja terampil *an sich* demi memenangkan persaingan pasar *skilled worker*.

Daftar Rujukan

- Administrator. "Jatim Dirikan SMK Mini di Pesantren," diakses pada 22 Oktober 2016, m.jaringnews.com/politik-peristiwa/umum/62327/jatim-dirikan-SMK-mini-di-pesantren.
- Administrator. "Jumlah SMK Terus Ditambah," *Kompasiana*, diakses pada 29 April 2016, edukasi.kompas.com/read/2012/08/29/20190521/Jumlah.SMK.Terus.Ditambah.
- Administrator. "Kanwil Kemenag Mulai Bangun Madrasah Aliyah Kejuruan," diakses 29 April 2016, m.antaranews.com/berita/538656/kanwil-kemenag-mulai-bangun-madrasah-aliyah-kejuruan.
- Administrator. "Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila," diakses pada Senin, 24 Oktober 2016, <http://bphn.go.id/data/documents/65pnp019.doc>.
- Administrator. "Program Vokasional Harus Dikelola secara Khusus," diakses pada 29 April 2016, edukasi.kompas.com/read/2012/09/11/11373884/Program.Vokasional.Harus.Dikelola.Secara.Khusus.
- Administrator. "Siapkan Rp 44 Triliun, Pemerintah Perkuat Pendidikan Kejuruan," 19 April 2016, di akses pada 22 Oktober 2016,

- <https://m.tempo.co/read/news/2016/04/19/090763903/siapkan-rp-44-triliun-pemerintah-perkuat-pendidikan-kejuruan>.
- Administrator. "SMK Bukan Pendidikan Kelas Dua," diakses pada 23 Januari 2017, <http://presidenri.go.id/pendidikan/SMK-bukan-pendidikan-kelas-dua.html>.
- Anshoriy, HM Nasruddin. *Dekonstruksi Kekuasaan: Konsolidasi Semangat Kebangsaan*. Yogyakarta: LKiS, 2008.
- Aronowitz, Stanley dan Henry Giroux, *Education Under Siege: The Conservative, Liberal, and Radical Debate Over Schooling*. London: Routledge & Kegan Paul, 1987.
- Booth, Anne. "Living Standards and the Distribution of Income in Colonial Indonesia: A Review of the Evidence." *Journal of Southeast Asian Studies* 19, no. 2, (September 1988).
- Burger, D H. *Structural Changes in Javanese Society: The Village Sphere, Translation Series: Modern Indonesia Project Southeast Asia Program*. Ithaca NY: Department of Far Eastern Studies Cornell University, 1957.
- Carey, Peter. *Takdir: Riwayat Pangeran Diponegoro (1785-1855)*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2014.
- Caurbaugh, Robert. "The International Economy and Globalization," dalam *International Economics*, edisi 11. Kanada: Thomson South-Western, 2008).
- Fakih, Mansour. "Pendidikan Alternatif: Melihat Kembali Gagasan Paulo Freire," dalam *Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik*. Yogyakarta: Insist Press dan Pustaka Pelajar, 2002.
- Fakih, Mansour. *Bebas dari Neoliberalisme*. Yogyakarta: Insist Press, 2010.
- Fauzi, Noer. *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*. Yogyakarta: Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar, 1999.
- Geertz, Clifford. "Modernization in A Moslem Society: The Indonesian Case." dalam *Quest*, vol. 39. Bombay: t.p., 1963.
- Jamali. "Kaum Santri dan Tantangan Kontemporer", dalam Marzuki Wahid (ed.), *Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.
- Kartodirdjo, Sartono dan Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media, 1991.
- Kartodirdjo, Sartono. *The Peasants' Revolt of Banten in 1888: Its Conditions, Course, and Sequel*. Amsterdam: S.Gravenhage-Martinius Nijhoff, 1966.
- Mangunwijaya, YB. *Paradigma Baru Pendidikan Rakyat dalam Menggagas Pendidikan Rakyat: Otosentrisitas Pendidikan dalam Wacana Politik Pembangunan*. Bandung: Alqaprint, 2000.

- Martono, Nanang. *Pendidikan Bukan Tanpa Masalah: Mengungkap Problematika Pendidikan dari Perspektif Sosiologi*. Yogyakarta: Gava Media, 2010.
- Muthohar AR, Ahmad. *Ideologi Pendidikan Pesantren: Pesantren di Tengah Arus Ideologi-Ideologi Pendidikan, Ikhtiar Memotret dan Mencari Formulasi Baru Sistem Pendidikan Pesantren dalam Berbagai Ideologi Pendidikan Kontemporer*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007.
- Nawawī (al), Muḥammad. *Qāmi' al-Ṭughyān*. Surabaya: Ṣaḥābat al-'Ilm, t.th.
- O'Neill, William F. *Educational Ideologies Contemporary Expressions of Educational Philosophy*. Iowa: Hunt Publishing Company, 1990.
- Ricklefs, M.C. *A History of Modern Indonesia since C. 1200*, edisi 3. Hampshire: Palgrave, 2001.
- Siradj, Said Aqil. *Tasawuf sebagai Kritik Sosial: Mengedepankan Islam sebagai Inspirasi Bukan Aspirasi*. Bandung: Mizan, 2006.
- Suparlan, *Mencerdaskan Kehidupan Bangsa: Dari Konsepsi Sampai dengan Implementasi* (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2004), 167-169.
- Syafei, Mochamad. "Salah Pemahaman Terhadap *Link and Match*," diakses pada 25 Oktober 2016, http://www.kompasiana.com/mochamadsyafei/salah-pemahaman-terhadap-link-and-match_5520423da33311c043b65ca4.
- Tim Penulis JNM. "Syaikhona Kholil: Teknologi Pelayaran dan Penyebaran Islam Nusantara," dalam *Gerakan Kultural Islam Nusantara*. Yogyakarta: Jaringan Nahdliyin Mataram, 2015.
- van Bruinessen, Martin. *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*, edisi 2. Bandung: Mizan, 1995.
- van Niel, Robert. "Measurement of Change under the Cultivation Sistem in Java, 1837-1851." *Jurnal Indonesia* 14 (Oktober 1972).
- Wagiran. "Pengembangan Pendidikan Kejuruan Berbasis Potensi Daerah dan Sumberdaya Alam dalam Mendukung Continuing Vocational Education," *Prosiding Seminar Internasional Peran LPTK dalam Pengembangan Pendidikan Vokasi di Indonesia: Konvensi Nasional V Aptekindo Forum Komunikasi FT/FFTK/FPTK-JPTK Universitas se-Indonesia*. Dilaksanakan di Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha Denpasar 29 April-2 Mei 2010.
- Wahid, Marzuki. "Pesantren di Lautan Pembangunanisme: Mencari Kinerja Pemberdayaan," dalam *Pesantren Masa Depan*, 152-156. Baca juga Mansour Fakih, *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Insist dan Pustaka Pelajar, 2001.